

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Hukum*, Jakarta, Fajar Interpratama Madiri, 2020.
- Fajar, Mukti, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatis dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 2010.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan. 2003.
- Pistone, Pasquale dkk, *Fundamentals of Taxation: An Introduction to Tax Policy, Tax Law and Tax administration*, Rietlandpark, IBDF. 2019.
- Salim, Agus dan Haeruddin, *Dasar-Dasar Perpajakan*, Palu, LPP-Mitra Edukasi. 2019
- Salim HS, H, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajawalipres, 2017.
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta, Kencana. 2006.
- Siahaan, Marihot pahala, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*, Jakarta, Raja Granfindo Persada. 2003.
- _____, *Bahan Kuliah: Metodologi Penelitian Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Yogyakarta. 2019.
- Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2013.
- Suyitno, *Hak Atas Tanah Kraton Kasultanan Yogyakarta*, Jakarta, Land LMPDP PIU Bapenas Edisi 01. 2006.
- Utomo, Tri Widodo Wahyu, *Hukum Pertanahan Dalam Prespektif Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Navila. 2002.

Jurnal/Artikel/Tesis-Disertasi

- Maksudi, Maulana Akbar, Dampak Pembebasan BPHTB Karena Pemberian Hak Baru Pertama Kali Ditinjau Dari Fungsi Budgeter dan Sistem Keuangan Daerah Dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 126 Tahun 2017, Skripsi, Program studi Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2018.
- Sukisno, Djoko, Tanah Kasultanan Yogyakarta Dalam Prespektif Hukum Adat, Yogyakarta, *Mimbar Hukum*. Fakultas Hukum UGM. Edisi Khusus. 2007.
- Sumardjono, Maria SW, Keistimewaan Yogyakarta di bidang Pertanahan: Status Hukum Tanah Kraton Dalam Lingkup Hukum Tanah Nasional, Yogyakarta, *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum UGM. Edisi Khusus. 2007.
- Santoso, Hari Agus, Tinjauan Terhadap Kedudukan Surat Tentang Penolakan Pengurangan BPHTB Yang Digugat Ke Pengadilan Pajak Jakarta (Studi kasus

gugatan PT.Affinity Health Indonesia). Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Lembaran Negara Nomor 130 Tahun 2000 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Nomor 130 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 5049.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaran Negara Nomor 170 Tahun 2012 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5339.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 2022 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 10 Tahun 1961) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997). Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1997.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara Nomor 52 Tahun 1998 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3746.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. Aturan tersebut direvisi dengan PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Nomor 28 Tahun 2021 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6630.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Nomor 168 Tahun 2007 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4797.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berita Negara Nomor 246 Tahun 2022.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Berita Daerah DIY Nomor 34 Tahun 2017.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Berita Daerah DIY Nomor 34 Tahun 2017.

Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 dan Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perwali Yogyakarta No.102 Tahun 2010 ttg Juklak Perda Kota Yogyakarta No.8 Tahun 2010 ttg Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Berita Daerah Nomor 29 Tahun 2021.

Internet

Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pengalihan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai Pajak Daerah Kabupaten/Kota, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2012/06/29/154403726712012-pengalihan-pajak-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan-bphtb-sebagai-pajak-daerah-kabupatenkota>, diakses 20 Juni 2023.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Pengecualian Pengenaan BPHTB Pada Peralihan Tanah Negara Menjadi Tanah Kasultanan Ditinjau Dari

Prinsip Ekuitas

ROBBY PANGESTU, Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>